

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PROGRAM PILAH SAMPAH DI KOTA SEMARANG

Jennifer Evelyn Sartika Silalahi, Supratiwi

Email: jenniferevelyn1989@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The increasing volume of urban solid waste has become a major environmental challenge in Semarang City, particularly regarding the burden of waste disposed at the Jatibarang Landfill, prompting the Semarang City Government to implement the Waste Sorting Program as a reduction strategy. This study aims to analyze the governance of that program using a good governance framework with indicators of transparency, accountability, effectiveness and efficiency, and public participation, further enriched by the integration of the Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) framework encompassing three dimensions, namely physical system elements, stakeholder involvement, and sustainability aspects, to enable a more contextual analysis of urban solid waste management. This research employed a qualitative approach with a case study method. Primary data were collected through in-depth interviews with the Semarang City Environmental Agency, village heads in five urban villages, and community members of urban villages. Secondary data were obtained from waste management statistics and program documentation. The findings indicate that the governance of the Waste Sorting Program in Semarang City has reflected the application of good governance principles, particularly in information dissemination, community involvement in implementation, and the utilization of various resources. However, several limitations remain, including insufficient transparency of program performance data, an unintegrated reporting system, and the lack of significant reduction in waste volume delivered to the landfill. Community participation also varies across areas. Based on these findings, this study recommends improving data transparency and regular publication of program performance, strengthening integrated reporting systems, intensifying community assistance at the local level, and developing sustainable strategies through multi-stakeholder collaboration.

Keywords: Good Governance, Waste Sorting Program, Jatibarang Landfill, Semarang City.

ABSTRAK

Permasalahan peningkatan timbulan sampah perkotaan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan di Kota Semarang, khususnya terkait beban sampah yang masuk ke TPA Jatibarang, sehingga Pemerintah Kota Semarang menerapkan Program Pilah Sampah sebagai strategi pengurangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola program tersebut menggunakan kerangka *good governance* dengan indikator transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi masyarakat, yang diperkaya dengan integrasi kerangka Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) mencakup elemen sistem fisik, keterlibatan stakeholder, dan aspek keberlanjutan agar analisis lebih kontekstual terhadap pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, lurah di lima kelurahan, serta masyarakat. Data sekunder diperoleh dari statistik pengelolaan sampah dan dokumentasi pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Program Pilah Sampah di Kota Semarang telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam penyampaian informasi program, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan, serta pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pelaksanaan program. Namun, tata kelola program masih menghadapi sejumlah keterbatasan, antara lain keterbukaan data capaian program yang belum optimal, mekanisme pelaporan yang belum terintegrasi secara menyeluruh, serta capaian pengurangan timbulan sampah ke TPA yang belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Partisipasi masyarakat juga belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi data dan publikasi capaian program secara berkala, penguatan sistem pelaporan terpadu, intensifikasi pendampingan masyarakat di tingkat kelurahan, serta pengembangan strategi keberlanjutan program berbasis kolaborasi multipihak.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Program Pilah Sampah, TPA Jatibarang, Kota Semarang.

PENDAHULUAN

Perkembangan perkotaan yang pesat mendorong peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada meningkatnya volume sampah. Perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan turut memperbesar jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah merupakan sisa kegiatan manusia atau proses alam berbentuk

padat yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi isu strategis dalam pembangunan perkotaan yang memerlukan penanganan yang efektif dan berkelanjutan (SEN, 2022).

Secara nasional, timbulan sampah di Indonesia menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

(SIPSN) mencatat bahwa volume sampah meningkat dari 19.020.928 ton pada tahun 2020 menjadi 36.009.662 ton pada tahun 2024 (SIPSN, 2025). Meskipun terjadi fluktuasi, volume sampah tetap tinggi dengan dominasi berasal dari sektor rumah tangga sebesar 55,45%. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah masih menjadi tantangan serius yang memerlukan strategi pengelolaan yang lebih optimal.

Pada tingkat daerah, Kota Semarang termasuk dalam salah satu kota dengan timbulan sampah tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 434.243 ton per tahun pada 2024 (SIPSN, 2025). Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk yang mencapai sekitar 1,7 juta jiwa serta meningkatnya aktivitas ekonomi turut berkontribusi terhadap tingginya produksi sampah (BPS Kota Semarang, 2024; Abdullah et al., 2013). Bahkan, produksi sampah harian di kota ini diperkirakan mencapai 800-1.200 ton per hari (Diskominfo Jateng, 2025).

Permasalahan utama pengelolaan sampah di Kota Semarang terletak pada tingginya ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Sistem pengelolaan yang

masih berorientasi pada kumpul-angkut-buang menyebabkan sebagian besar sampah tidak melalui proses pemilahan dan pengolahan sejak dari sumbernya (Muning Harjanti et al., 2020). Akibatnya, kapasitas TPA semakin terbebani dan menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta risiko kesehatan masyarakat (Wulandari, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang belum optimal dan memerlukan inovasi kebijakan yang lebih efektif.

Sebagai respons, Pemerintah Kota Semarang meluncurkan Program Pilah Sampah yang mendorong masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah menjadi sampah organik dan anorganik. Program ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus mendorong pemanfaatan sampah melalui komposting dan daur ulang (Rasyid & Hasibuan, 2023). Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi sirkular di masyarakat.

Keberhasilan implementasi program pilah sampah sangat

dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang jelas menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif (Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2024). Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat sebagai penghasil utama sampah juga menjadi kunci keberhasilan program. Dalam hal ini, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, menjadi landasan penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Semarang umumnya masih berfokus pada pengembangan bank sampah dan digitalisasi sistem persampahan. Meskipun memberikan dampak positif, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya tata kelola. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas tata kelola pemerintahan dalam implementasi program pilah sampah di Kota Semarang masih terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tata kelola pemerintahan dalam Program Pilah Sampah di Kota Semarang, serta mengkaji peran dan interaksi antar aktor dalam mendukung keberhasilan program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris serta rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan (*good governance*) merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam mencapai tujuan publik (Damanik et al., 2024). Konsep *good governance* menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Maranjaya, 2022).

Dalam penelitian ini, prinsip *good governance* yang digunakan difokuskan pada beberapa indikator utama, yaitu:

1. **Transparansi:** Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program;
2. **Akuntabilitas:** Pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan dan pelaksanaan program;
3. **Efektivitas dan efisiensi:** Kemampuan program mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal;
4. **Partisipasi masyarakat:** Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.

Keempat prinsip tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Pilah Sampah di Kota Semarang, khususnya dalam melihat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Integrated Sustainable Waste Management* (ISWM) yang dikemukakan oleh Anschütz et al. (2024). Pendekatan ini menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek teknis dan

sosial. ISWM terdiri dari tiga dimensi utama:

1. **Pemangku kepentingan (stakeholder):** Keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah (Scheinberg, 2010).
2. **Elemen sistem (waste system elements):** Tahapan pengelolaan sampah dari timbulan, pemilahan, pengumpulan, hingga pemrosesan akhir.
3. **Aspek keberlanjutan (sustainable aspects):** Mencakup aspek finansial, sosial, institusional, dan regulasi (Scheinberg et al., 2010).

Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana sistem pengelolaan sampah berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, ISWM juga memperkuat analisis *good governance*, khususnya dalam menilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan sampah (Zein et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis tata kelola Program Pilah Sampah di Kota Semarang. Pendekatan ini dipilih karena

mampu memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, khususnya terkait interaksi antar aktor dan partisipasi masyarakat (Pola Anto et al., 2024).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang pada tahun 2025. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, meliputi Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kelurahan, masyarakat, dan organisasi lingkungan.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi dan laporan terkait (Sulung & Muspawi, 2024). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2020).

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Nurrisa & Hermina, 2025). Untuk menjaga validitas, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber dan metode data (Susanto et al., 2023).

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan dalam Program Pilah Sampah di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Pilah Sampah di Kota Semarang menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, serta masyarakat sebagai aktor utama. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi masyarakat, serta dipertajam melalui kerangka *Integrated Sustainable Waste Management (ISWM)* untuk melihat keterpaduan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

1. Transparansi

Pelaksanaan transparansi dalam program pilah sampah telah dilakukan melalui penyampaian informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kelurahan kepada masyarakat melalui forum-forum sosial seperti RT/RW, PKK, dan pertemuan warga. Pendekatan ini dinilai cukup efektif karena memanfaatkan saluran komunikasi yang dekat dengan masyarakat,

sehingga informasi dapat diterima dengan lebih mudah dan kontekstual.

Namun, transparansi yang diterapkan masih bersifat informatif dan belum mencapai transparansi yang substantif. Informasi yang disampaikan lebih banyak berfokus pada kebijakan dan ajakan partisipasi, sementara data terkait kinerja program, seperti jumlah timbulan sampah, capaian pengurangan, serta perkembangan program, belum tersedia secara terbuka dan berkelanjutan. Keterbatasan data kuantitatif di tingkat kelurahan semakin memperkuat kondisi ini.

Dalam perspektif ISWM, transparansi seharusnya mencakup keterbukaan informasi pada seluruh alur pengelolaan sampah. Ketidakterbukaan data ini menyebabkan masyarakat belum memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap capaian program. Oleh karena itu, transparansi dalam program ini masih perlu diperkuat melalui penyediaan data yang terintegrasi dan mudah diakses publik.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam program pilah sampah telah berjalan melalui mekanisme pelaporan internal yang dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Lingkungan Hidup hingga ke tingkat kelurahan. Setiap aktor menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada, termasuk dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pelaporan administratif.

Meskipun demikian, akuntabilitas yang ada masih berorientasi pada pertanggungjawaban internal dan belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas publik. Hal ini terlihat dari belum adanya sistem pelaporan yang terintegrasi dan terbuka bagi masyarakat. Selain itu, pelaporan yang dilakukan masih didominasi oleh aspek aktivitas, seperti jumlah kegiatan sosialisasi, tanpa didukung oleh indikator kinerja yang terukur.

Jika ditinjau melalui kerangka ISWM, kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam sistem pengelolaan sampah belum sepenuhnya terintegrasi, khususnya dalam hal pelaporan antar aktor. Keterlibatan masyarakat melalui

bank sampah dan kelompok lainnya belum terhubung dalam satu sistem pelaporan yang utuh. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas perlu diarahkan pada pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi dan transparan, serta peningkatan akses publik terhadap hasil evaluasi program.

3. Efektivitas dan Efisiensi

Dari sisi efektivitas, program pilah sampah telah memberikan dampak positif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat mulai melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga serta memanfaatkan sampah sebagai sumber nilai ekonomi melalui kegiatan bank sampah. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.

Namun, capaian program dalam menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang belum menunjukkan hasil yang konsisten. Fluktuasi volume sampah menunjukkan bahwa dampak program belum stabil dan masih dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam

perspektif ISWM, kondisi ini disebabkan oleh belum terintegrasinya elemen sistem, terutama pada tahap pengangkutan yang masih mencampurkan kembali sampah yang telah dipilah.

Dari sisi efisiensi, program telah memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal, baik dari anggaran pemerintah maupun dukungan masyarakat. Namun, efisiensi ini masih menghadapi tantangan keberlanjutan, seperti ketergantungan pada bantuan operasional, keterbatasan regulasi operasional, serta perbedaan kapasitas antar kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi sistem dan aspek keberlanjutan agar efektivitas dan efisiensi program dapat meningkat secara jangka panjang.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam program pilah sampah telah terlihat pada berbagai tahapan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan lingkungan. Pemerintah telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat melalui

forum warga serta pembentukan kelompok pengelola seperti bank sampah dan PKK.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih belum merata dan cenderung didominasi oleh kelompok tertentu. Sebagian masyarakat masih belum aktif berpartisipasi secara konsisten, yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran, kebiasaan, serta keterbatasan waktu. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan sektor informal juga belum terintegrasi secara optimal dalam program.

Dalam perspektif ISWM, partisipasi masyarakat yang ada saat ini masih berada pada tahap fungsional, di mana masyarakat berperan sebagai pelaksana program namun belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan partisipasi agar keterlibatan masyarakat dapat berkembang menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Pilah Sampah di Kota Semarang menunjukkan

adanya upaya penerapan prinsip-prinsip *good governance* melalui keterlibatan pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana utama. Program ini telah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah serta memperkuat peran komunitas melalui bank sampah dan kelembagaan lokal.

Namun, berdasarkan analisis menggunakan pendekatan ISWM, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama pada belum terintegrasinya seluruh elemen sistem pengelolaan sampah. Ketidaksinkronan antara pemilahan di tingkat rumah tangga dengan sistem pengangkutan dan pengelolaan di hilir menyebabkan dampak program terhadap pengurangan volume sampah di TPA belum optimal. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan yang belum menyeluruh serta kapasitas kelembagaan yang tidak merata menjadi tantangan bagi keberlanjutan program.

Dengan demikian, program pilah sampah masih memerlukan penguatan pada aspek integrasi sistem, kelembagaan, dan kolaborasi antar aktor agar program pilah sampah dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan

sampah yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

SARAN

1. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi rutin serta pengembangan sistem pelaporan terpadu yang mengintegrasikan data lintas aktor, disertai pemerataan sarana pemilahan sampah.
2. Kelurahan perlu memperkuat pendampingan kepada masyarakat dan memperluas keterlibatan, termasuk generasi muda, untuk mendukung keberlanjutan program.
3. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan konsistensi dalam memilah sampah serta aktif menyampaikan masukan melalui forum yang tersedia.
4. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji aspek ekonomi dan efektivitas sistem pengangkutan sampah terpilah guna mendukung keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R., Hariani, D., Jurusan, R., Publik, A., Profesor, J., Soedarto, H., Hukum, S., & Kotak, T. S. (2013). *Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*.
- Abdulnabi Ali, A., Golbert, Y., Reksa, A. F. A., Kretzer, M. M., & Schweiger, S. (2023). *Transformative Solutions in the Global South: Addressing Solid Waste Management Challenges in Jakarta Through Participation by Civil Society Organizations?* (pp. 329–351). https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6_18
- BPS Kota Semarang. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin*. Badan Pusat Statistik Kota Semarang. <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
- Damanik, P., Nugraha, M. H. S., Hum, M., Tiyas, V., Widyastuti, S. H., & Nur, F. (2024). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TEORI, PRINSIP, DAN PRAKTIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Diskominfo Jateng. (2025). *Wali Kota Semarang Ajak Investor Bangun PSEL Jatibarang*. DetikJateng. <https://jatengprov.go.id/beritadiera/wali-kota-semarang-ajak-investor-bangun-psel-jatibarang/>
- Jurnal Kebijakan Pemerintahan. (2024). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 43–60. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Kelurahan Brumbungan. (2024). *Jumlah Penduduk Kelurahan Brumbungan*. <https://brumbungan.semarangkota.go.id/>
- Kelurahan Bulu Lor, K. S. (2025). *Gerakan Pilah Sampah dari Rumah Menuju Semarang Bersih*. Pemerintah Kota Semarang. <https://bululor.semarangkota.go.id/blog/gerakan-pilah-sampah-dari-rumah-menuju-semarang-bersih>

- Kelurahan Krobokan. (2024). *Jumlah Penduduk Kelurahan Krobokan*. <https://krobokan.semarangkota.go.id/>
- Kelurahan Panggung Lor. (2024). *Jumlah Penduduk Kelurahan Panggung Lor*. <https://panggunglor.semarangkota.go.id/>
- Kelurahan Pedalangan. (2024). *Jumlah Penduduk Kelurahan Pedalangan*. <https://pedalangan.semarangkota.go.id/>
- Kelurahan Rejosari. (2024). *Jumlah Penduduk Kelurahan Rejosari*. <https://rejosari.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk>
- Khodijah & Pharmawati. (2023). Evaluasi TPS 3R di Kota Bandung. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (JPLB)*, 7(2). ISSN: 2598-0017.
- Maranjaya, A. K. (2022). GOOD GOVERNANCE SEBAGAI TOLAK UKUR UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAHAN. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)*, 2, No. 11.
- Muning Harjanti, I., Anggraini, P., & Studi Diploma Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota, P. (2020). *PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) JATIBARANG, KOTA SEMARANG* (Vol. 17, Number 2).
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*. 02, 793–800.
- Pola Anto, R., Nikmatullah Nur, Ms., Si, S., Sc Yusriani, M., Fenni Kurniawati Ardah, Mk., Juwita Desri Ayu, Sp., Adi Nurmahdi, Mk., Baiq Ahda Razula Apriyeni, M., Purwanti, Ms., Narita Yuri Adrianingsih, M., & Miftah Fariz Prima Putra, Ms. (2024). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: TEORI DAN PENERAPANNYA*.
- Rasyid, M., & Hasibuan, R. (2023). *MANFAAT DAUR ULANG SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK UNTUK KESEHATAN LINGKUNGAN*.
- Sari, I. (2022). Landasan Filosofis dan Teoritis Penelitian Kualitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif* (p. 1). Unisma Press.
- SEN, A. (2022). SOLID WASTE MANAGEMENT ISSUES AND CHALLENGES. *Pollution Research*, 41(04), 1240–1245. <https://doi.org/10.53550/pr.2022.v41i04.015>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Volume 5, Nomor 3.
- Susanto, D., Jailani, Ms., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Wulandari, R. (2024). Strategi berkelanjutan dalam mengatasi krisis sampah di Kota Semarang. *Inovasi*, 21(1), 1–14. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v21i1.852>